



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN FISKAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NELLA SRI HENDRIYETTY**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **402543**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.477.028.900

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 125.976.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 125.976.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 125.076.900
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 672.000.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO SPIRIT S3 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.518.613.147
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.667.642.047
III. HUTANG	Rp.	376.298.687
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.291.343.360

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.